

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dimulai tahun 2006 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan dampak pemberlakuan kebijakan otonomi daerah, dimana dalam penyelenggaraan pendidikan ada pembagian kewenangan pemerintahan pusat dan daerah. Hal ini sebagai pengejawantahan pemberlakuan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana pada salah satu pasalnya memberi hak, kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan daerah dan masyarakat setempat. Pada pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan, salah satunya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian pemerintahan daerah berkewajiban untuk memfasilitasi layanan pendidikan bagi masyarakatnya terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk di dalamnya adalah dalam merancang kurikulum yang digunakan di daerahnya.

Kaitannya dengan kurikulum persekolahan yang digunakan di daerah, maka dalam perencanaan dan pembuatannya mengacu pada kebijakan tersebut. Dengan demikian KTSP dibuat oleh satuan pendidikan yang kemudian ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam hal ini dinas pendidikan terkait. Posisi pemerintah pusat dalam penetapan kurikulum ini adalah memberi rambu-rambu dan standar yang menjadi rujukan bagi setiap sekolah dalam penyusunan kurikulum. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20

Dedy Suryadi, 2013

Pengembangan Model Evaluasi Implementasi Kurikulum Kejuruan (Studi pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa KTSP yang dibuat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 dan 23 tahun 2006. tentang Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta berpedoman pada Panduan penyusunan KTSP yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pada awal diberlakukannya kebijakan penyusunan KTSP oleh satuan pendidikan, banyak fenomena yang mengemuka berkaitan dengan kesiapan satuan pendidikan dalam penyusunannya. Sosialisasi dan pembimbingan yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional maupun dinas-dinas pendidikan di daerah pun pada saat itu belum optimal. Hal ini berdampak pada terjadinya praktik mengadopsi atau membeli hasil KTSP yang dibuat oleh pihak lain, tentunya kondisi ini amat memprihatinkan. Namun sejalan dengan perkembangan, maka secara perlahan kesiapan dan kemampuan satuan pendidikan dalam merancang KTSP sudah mengalami kemajuan. Optimalisasi forum dan kelompok guru-guru dalam wadah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) memberi peningkatan pada wawasan dan kemampuan guru-guru dalam merancang kurikulum dan implementasinya di sekolah.

Sistem pendidikan nasional mengatur penjenjangan dalam setiap tingkatan, yakni pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Dalam sistem pendidikan menengah terdapat dua jenis pendidikan, yakni pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah kejuruan dalam sistem pendidikan nasional diatur kedudukannya dalam Undang-undang No. 20

Dedy Suryadi, 2013

Pengembangan Model Evaluasi Implementasi Kurikulum Kejuruan (Studi pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pada Pasal 18 dan penjelasan Pasal 15. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, ayat (2) menyatakan pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, ayat (3) menyatakan bahwa pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. Pada penjelasan Pasal 15 memberi penegasan tentang orientasi pendidikan kejuruan, bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama bekerja dalam bidang tertentu. Namun dalam Pasal 19 ayat 1 tentang pendidikan tinggi dinyatakan pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas, setidaknya ada dua orientasi tujuan penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan, yakni menyiapkan lulusannya terutama bekerja dalam bidang keahlian tertentu dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi terutama yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuni sebelumnya di SMK. Meskipun terdapat banyak fenomena bahwa lulusan SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi ada yang tidak berkaitan sama sekali dengan bidang keahlian yang dipelajari sebelumnya.

Kaitannya dengan program Kementerian Pendidikan Nasional untuk meningkatkan proporsi SMK dengan beragam keahlian sesuai dengan tuntutan kebutuhan akan tenaga teknis level menengah menjadi nilai positif dalam

Dedy Suryadi, 2013

Pengembangan Model Evaluasi Implementasi Kurikulum Kejuruan (Studi pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengembangan SMK. Sosialisasi SMK dengan beragam keahlian dan keunggulannya, serta dengan banyaknya produk-produk inovatif yang dikembangkan di SMK meningkatkan animo masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya di SMK. Terutama bagi masyarakat yang berharap banyak bahwa anak-anaknya yang lulus SMK bisa mendapat pekerjaan secara cepat untuk dirinya dan dapat membantu ekonomi keluarga.

Harapan masyarakat terhadap SMK sebagai sekolah yang menjanjikan masa depan anak-anaknya tentunya menjadi aspek yang penting dipertimbangkan, mengingat fakta di lapangan tidak sederhana yang dibayangkan. Fakta bahwa dunia usaha dan dunia industri tidak serta merta dapat menyerap lulusan SMK menjadi masalah tersendiri. Lulusan SMK umumnya dianggap tidak siap kerja dan tidak mempunyai kompetensi yang disyaratkan oleh industri, serta dianggap tidak dapat cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Tentunya anggapan dan tuntutan ini perlu disikapi secara arif oleh penyelenggara SMK, meskipun penilaian ini dianggap tidak adil bilamana pihak dunia usaha dan dunia industri tidak berkontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan mengingat mereka adalah pengguna lulusan SMK (*stakeholder*). Namun pada kasus di beberapa SMK, beberapa industri otomotif, elektronika, dan telekomunikasi sudah menjalin kerjasama erat dengan SMK baik dalam hal penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun di industri.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Mandikdasmen No. 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, menyatakan bahwa struktur spektrum melingkupi beberapa kelompok bidang keahlian, yakni:

Dedy Suryadi, 2013

Pengembangan Model Evaluasi Implementasi Kurikulum Kejuruan (Studi pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Teknologi dan Rekayasa
- Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Kesehatan
- Seni, Kerajinan dan Pariwisata
- Agribisnis dan Agroteknologi
- Bisnis dan Manajemen

Pada kelompok teknologi dan rekayasa terdapat 18 belas program studi keahlian, diantaranya Teknik Bangunan, Teknik Plambing dan Sanitasi, Teknik Survey dan Pemetaan, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik Otomotif dan sebagainya.

Kemudian dari kelompok program studi keahlian, diuraikan lagi pengelompokkan dalam kompetensi keahlian, dimana yang terakhir inilah menjadi dasar dalam penjurusan kompetensi keahlian yang diberlakukan di SMK. Dalam program studi keahlian Teknik Bangunan, mencakup lima kompetensi keahlian, yakni:

- Teknik Konstruksi Baja (TKB)
- Teknik Konstruksi Kayu (TKY)
- Teknik Konstruksi Batu dan Beton (TKBB)
- Teknik Gambar Bangunan (TGB)
- Teknik Furnitur (TF)

Perubahan spektrum keahlian ini yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tidak memberikan perubahan positif, khususnya bagi program studi keahlian Teknik Bangunan. Pemberlakuan spesialisasi di program studi keahlian Teknik Bangunan tidak sepenuhnya mampu

Dedy Suryadi, 2013

Pengembangan Model Evaluasi Implementasi Kurikulum Kejuruan (Studi pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menjawab kebutuhan dunia industri terutama jasa konstruksi bangunan. Industri konstruksi biasanya berharap bahwa lulusan SMK Bangunan bisa bekerja pada seluruh jenis konstruksi bangunan. Tentunya berbeda dengan praktik yang dilakukan negara-negara maju seperti Jerman yang sudah memberlakukan adanya spesialisasi keahlian di bidang teknis, sehingga tidak menjadi permasalahan karena aturannya jelas dan ditaati. Belum lagi adanya anggapan masyarakat bahwa lulusan SMK Bangunan dipahami hanya menjadi tukang bangunan, sehingga menurunkan minat menyekolahkan anaknya pada program studi keahlian Teknik Bangunan.

Fakta yang terjadi di SMK bahwa terjadi penurunan jumlah siswa yang menekuni program studi keahlian Teknik Bangunan khususnya kompetensi keahlian konstruksi bangunan (baja, kayu, dan batu beton). Beberapa SMK di Jawa Barat sudah menutup beberapa kompetensi keahlian, seperti konstruksi baja sudah tidak ada, konstruksi kayu hanya ada dua SMK, dan konstruksi batu dan beton masih ada lima SMK yang menyelenggarakan pendidikan keahliannya. Tentunya ini menjadi pertanyaan besar bahwa sebenarnya kebutuhan akan tenaga teknis bangunan masih sangat besar mengingat kebutuhan akan bangunan rumah, properti dan infrastruktur bangunan sipil akan senantiasa meningkat seiring bertambahnya populasi penduduk.

Pada satu tahun terakhir ini, ada perkembangan positif yang terjadi di dunia jasa konstruksi dengan adanya regulasi yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum mengacu pada pemberlakuan SKKNI. Aturan yang diberlakukan adalah tentang persyaratan tenaga ahli dan tenaga terampil yang bekerja di industri jasa konstruksi harus memiliki kualifikasi pendidikan teknik

Dedy Suryadi, 2013

Pengembangan Model Evaluasi Implementasi Kurikulum Kejuruan (Studi pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan sertifikasi keahlian/kompetensi. Legalisasi sertifikasi keahlian dan keterampilan ini adalah untuk memberi rasa aman konstruksi bangunan terhadap bahaya keruntuhan dan kerusakan konstruksi yang diakibatkan oleh pelaksana bangunan tidak mempunyai kompetensi keahlian standar yang disyaratkan. Temuan lain yang memperkuat pentingnya regulasi ini adalah hasil penelitian terhadap kerusakan konstruksi akibat terjadinya gempa, yakni banyak bangunan rumah yang rusak dan ambruk diakibatkan rumah tidak dirancang dan dibangun sesuai kaidah teknis dan konstruksi (*un-engineering*).

Tentunya ini menjadi peluang bagi penyelenggara pendidikan di SMK program studi keahlian Teknik Bangunan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga bisa menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan. Setidaknya tiga aspek yang perlu diperhatikan oleh penyelenggaran SMK, pertama bahwa rancangan KTSP disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang disyaratkan dunia industri dan perkembangan teknologi mutakhir di bidang teknologi konstruksi. Kedua, proses implementasi kurikulum harus konsisten dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan rancangan yang dibuat dalam struktur kurikulum dan pedoman pelaksanaan kurikulum. Ketiga, upaya perbaikan dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum harus dirancang sebagai program berkelanjutan.

Dalam konteks rancangan kurikulum, upaya perbaikan sudah dilakukan melalui berbagai kebijakan perubahan kurikulum dan paradigma penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Kurikulum yang pertama digunakan di SMK adalah kurikulum 1964, dimana program kurikulum memperlihatkan tujuan pendidikan kejuruan tidak jelas dan ambivalen. Kurikulum dianggap sarat teori, dan metode

Dedy Suryadi, 2013

Pengembangan Model Evaluasi Implementasi Kurikulum Kejuruan (Studi pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengajaran lebih bersifat satu arah, tidak didukung oleh kualitas dan kuantitas guru serta fasilitas praktek yang tidak memadai.

Selanjutnya dilakukan penyempurnaan dengan kurikulum SMK 1976, dimana ada tujuan pendidikan tidak ambivalen, bahwa lulusan SMK disiapkan untuk memasuki lapangan kerja (terminal) dan kualifikasi tamatan dikaitkan dengan tingkatan keahlian dunia kerja. Pada kurikulum 1984, dilakukan pengelompokan pendidikan kejuruan menjadi pertanian dan kehutanan, rekayasa, usaha dan perkantoran, kesehatan dan kemasyarakatan, kerumahtanggaan dan budaya. Kurikulum SMK 1984 tidak hanya bersifat terminal tetapi juga memberi peluang siswanya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Dalam proses pembelajarannya memadukan antara teori dan praktek kejuruan yang sebelumnya terpisah.

Pada perkembangan selanjutnya dilakukan penyempurnaan kurikulum, yakni dengan diberlakukannya kurikulum SMK 1994 yang menegaskan tentang sistem pendidikan menengah kejuruan, penataan manajemen sekolah dengan Pengembangan Sekolah Seutuhnya (PSS), perintisan unit produksi, perintisan institusi pasangan dan kebijakan *link and match* yang dioperasionalkan dengan Pendidikan Sistem Ganda (PSG).

Pada kurikulum edisi 1999, Garis-garis Besar Program Pendidikan dan Pelatihan (GBPP) dan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum SMK, menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Kurikulum berbasis luas, kuat dan mendasar (*broad based curriculum*)
- Kurikulum berbasis kompetensi (*competency based curriculum*)
- Pembelajaran tuntas (*mastery learning*)

Dedy Suryadi, 2013

Pengembangan Model Evaluasi Implementasi Kurikulum Kejuruan (Studi pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- Pembelajaran berbasis ganda (*dual based program*) yang dilaksanakan di sekolah dan di industri
- Perkuatan kemampuan daya suai dan kemandirian pengembangan diri tamatan.

Selanjutnya pemberlakuan kurikulum 2004 dengan penekanan pada kurikulum berbasis kompetensi (KBK) bagi kalangan pendidik pada lingkup pendidikan menengah kejuruan (SMK), secara konseptual tidak menjadi persoalan karena sudah mengenal lebih dekat dengan konsep kompetensi ini. Namun tetap merupakan suatu hal yang harus diantisipasi oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan teknologi dan kejuruan. Terakhir adalah diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, sebagai pengejawantahan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. KTSP merupakan kebijakan untuk memberi peluang dan kewenangan luas bagian tiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, peserta didik, potensi dan karakteristik daerah serta budaya masyarakat setempat. KTSP ini merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah dengan supervisi dari dinas pendidikan setempat. KTSP dibuat dengan mengacu pada Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) serta Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Posisi pemerintah dalam KTSP ini adalah memberi payung hukum dan standar yang perlu dijadikan panduan atau pedoman sekolah dalam pengembangan kurikulum

Dedy Suryadi, 2013

Pengembangan Model Evaluasi Implementasi Kurikulum Kejuruan (Studi pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bila dicermati secara komprehensif dapat ditelusuri bahwa perubahan kurikulum itu tidak serta merta mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh SMK. Terutama berhubungan dengan internal kelembagaan maupun dengan *stakeholder* yakni masyarakat dan dunia industri, yakni yang berkenaan dengan tuntutan kualitas lulusan dan persyaratan kompetensi memasuki dunia kerja. Paparan naskah akademik tentang kajian kebijakan kurikulum SMK yang dilakukan Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas 2007, menegaskan bahwa ditemukan beberapa permasalahan berkenaan dengan implementasi kurikulum SMK, diantaranya:

- Sebagian warga sekolah belum memahami standar isi, substansi dan implementasinya ke dalam KTSP
- Struktur kurikulum dan beban belajar masih terlalu sarat beban
- Belum tercukupinya bahan ajar pada aspek kuantitas dan kualitas
- Silabus dan RPP belum tersusun berdasarkan analisis kebutuhan sekolah dan keunggulan lokal
- Proses pembelajaran belum terlaksana sesuai dengan standar isi, standar proses dan standar penilaian
- Sebagian guru belum melaksanakan sistem penilaian sesuai tuntutan KTSP.

Kemudian berdasarkan studi awal terhadap dokumen kurikulum dan perangkat pendukungnya serta wawancara dengan pimpinan dan guru-guru program studi keahlian Teknik Bangunan diperoleh gambaran tentang kurikulum dan implementasi kurikulum di SMK. Rancangan KTSP yang dibuat semuanya

Dedy Suryadi, 2013

Pengembangan Model Evaluasi Implementasi Kurikulum Kejuruan (Studi pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas No. 22 dan 23 tahun 2006), meskipun tetap mengintegrasikan kurikulum 2004 sebagai bahan penyusunan KTSP. Kemudian pada tahap proses implementasi kurikulum dalam bentuk pembelajaran teori dan praktik kejuruan, kendala minimnya fasilitas pembelajaran serta material praktik menjadi permasalahan tersendiri. Dukungan kelembagaan dari pemerintah daerah dan industri-industri konstruksi dan material bangunan relatif kecil dan tidak sepadan untuk menghasilkan suatu pembelajaran teknologi dan kejuruan yang memadai.

Proses implementasi kurikulum di SMK Kompetensi Keahlian (KK) TKBB, berdasarkan studi lapangan belum secara konsisten dilakukan oleh guru maupun sekolah. Hal ini diperkuat temuan awal studi pendahuluan yang dilaksanakan mahasiswa pada proses pembelajaran di beberapa SMK program studi keahlian Teknik Bangunan memperlihatkan kecenderungan metode pembelajaran tidak bervariasi (monoton), minimnya penggunaan media dan alat peraga pembelajaran.

Sejatinya, dalam kurikulum dan pedoman pelaksanaan sudah dideskripsikan secara jelas. Terlebih dengan diberlakukannya standar-standar nasional pendidikan sebagai *benchmark* penyelenggaraan pendidikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pihak sekolah untuk melakukan proses perbaikan dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum sebagaimana disyaratkan dalam standar nasional pendidikan, khususnya standar proses (Permendiknas No, 41 tahun 2007). Meskipun demikian, upaya tersebut kebanyakan tidak didasarkan suatu kajian secara mendalam tentang keseluruhan aspek-aspek kurikulum yang

Dedy Suryadi, 2013

Pengembangan Model Evaluasi Implementasi Kurikulum Kejuruan (Studi pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

diimplementasikan. Pihak sekolah hanya melakukan monitoring dengan menggunakan instrumen pendataan keterlaksanaan program didasarkan pada dokumen yang ada. Beberapa program studi lainnya ada yang melakukan eksplorasi profil kompetensi lulusan SMK KK TKBB yang dibutuhkan dengan mengundang nara sumber dari dunia industri konstruksi sebagai masukan bagi perubahan konten kurikulum. Tentunya informasi yang dikumpulkan menjadi tidak akurat dan tidak bermakna dalam kerangka perbaikan implementasi kurikulum.

Pola posisi ini, evaluasi sebagai bagian dari sistem kurikulum belum digunakan sebagai satu pedoman oleh SMK KK TKBB dalam melakukan penilaian terhadap implementasi kurikulum. Ketidakjelasan pedoman evaluasi implementasi kurikulum merupakan suatu indikasi bahwa perbaikan implementasi kurikulum belum secara konsisten diawali oleh perencanaan evaluasi secara komprehensif sebagai bagian dari kurikulum. Terlebih pada pemahaman dan kemampuan guru-guru khususnya dalam proses perencanaan dan pengembangan kurikulum operasional kebanyakan belum memadai.

Mempertimbangkan bahwa komprehensivitas bahasan dalam pengembangan kurikulum, maka penting memilih prioritas penataan yang dapat dilakukan oleh pimpinan program studi dan guru-guru. Salah satu komponen penting adalah aspek keterlaksanaan kurikulum di sekolah, mengingat sebaik dan sesempurna suatu kurikulum bilamana implementasinya tidak baik maka tujuan kurikulum tidak mungkin tercapai. Dalam konteks upaya perbaikan pelaksanaan kurikulum yang diimplementasikan, langkah awal adalah melakukan evaluasi dan

penilaian terhadap kinerja implementasi kurikulum di sekolah yang mengacu pada standar-standar penyelenggaraan pendidikan.

Suatu evaluasi dikatakan berhasil bilamana informasi yang diperoleh memiliki validitas dan keakuratan sesuai fakta di lapangan sehingga menjadi informasi bernilai untuk menentukan keputusan perbaikan. Prasyarat tersebut mutlak dipenuhi oleh suatu model evaluasi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian dengan objek yang akan dievaluasi. Mengingat bahwa fokus penelitian ini adalah pada aspek keterlaksanaan kurikulum di SMK KK TKBB, maka penting dilakukan suatu pengembangan model evaluasi implementasi kurikulum yang memiliki keandalan, kepraktisan, keefektifan, dan efisiensi dalam penggunaannya dengan tetap menekankan akurasi pada informasi yang diperoleh. Dengan demikian hasilnya bisa dijadikan pedoman bagi penyelenggara SMK KK TKBB dalam melakukan penilaian terhadap kinerja implementasi dan memberi pertimbangan perbaikan implementasi kurikulum.

Beberapa penelitian tentang evaluasi kurikulum dilakukan oleh beberapa ahli dan praktisi pendidikan dengan menggunakan model-model evaluasi yang berbeda. Ali (1986) dalam studi evaluatif dengan menggunakan model evaluasi *discrepancy*, mengenai perbedaan antara komponen-komponen yang direncanakan dan dilaksanakan dalam perkuliahan, menemukan terdapat perbedaan sedikit dan ada juga temuan tidak berbeda. Penelitian yang dikembangkan Sukmadinata (1998) berkaitan dengan pengendalian mutu pendidikan di SMK, pada satu bahasannya mengungkapkan bahwa sebagian besar guru SMK dalam penyampaian pelajarannya masih bersifat ekspositori. Pengembangan model evaluasi kurikulum multidimensi untuk kurikulum berbasis kompetensi di

Dedy Suryadi, 2013

Pengembangan Model Evaluasi Implementasi Kurikulum Kejuruan (Studi pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Politeknik, dikembangkan oleh Hutahaean (2005). Dalam pengembangannya menggunakan model evaluasi CIPP berbasis *software* dengan enam dimensi yang diarahkan untuk penyediaan informasi penentuan keputusan perbaikan kurikulum. Kemudian penelitian yang dilakukan Santosa (2009) tentang evaluasi kurikulum dan implementasinya di program studi Teknik Kimia Poltek Negeri Malang dengan menggunakan model CIPP. Temuan penelitiannya menyatakan bahwa proses pembelajaran di Jurusan Teknik Kimia masuk pada kategori baik dan kurikulum yang digunakan sesuai dan mendukung tercapainya kompetensi lulusan. Muliati (2005) melakukan evaluasi program sistem ganda (PSG) pada sebuah SMK di Sulawesi Selatan dengan menggunakan evaluasi model *Countenance* dari Stake. Berkenaan dengan kurikulum tahun 1994, Sukamto (2000) melakukan evaluasi kurikulum menurut persepsi guru dan siswa di DIY dengan mengacu pada pedoman evaluasi formatif. Hasil penelitian mengungkapkan adanya beberapa kendala berkenaan dengan kelengkapan sarana dan fasilitas pembelajaran serta terdapat pokok-pokok bahasan yang dirasakan asing. Kemudian, Arfandi (2009) melakukan evaluasi pelaksanaan Praktik Kerja Industri di SMK Program Keahlian Teknik Bangunan di Kota Makasar. Model evaluasi menggunakan model *Countenance*, dan temuan penelitian menunjukkan adanya kesiapan siswa, sekolah dan industri dalam melaksanakan pembelajaran praktik kerja industri. Beberapa penelitian lainnya berkaitan dengan evaluasi berkenaan dengan kurikulum maupun program banyak dilakukan dengan berbagai model evaluasi yang disesuaikan dengan tujuan dan lingkup evaluasi.

Dalam penelitian ini, kekhususan pemilihan model evaluasi implementasi kurikulum yang dikembangkan, selain selaras dengan program studi keahlian

Dedy Suryadi, 2013

Pengembangan Model Evaluasi Implementasi Kurikulum Kejuruan (Studi pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

peneliti, juga pada kondisi faktual kelembagaan SMK KK TKBB yang memiliki kebutuhan dalam penyelesaian permasalahan spesifik baik secara internal maupun eksternal. Terlebih pemberlakuan KTSP yang dibuat satuan pendidikan, maka dalam tahap implementasi dan evaluasi terhadap keseluruhan kinerja implementasi kurikulum selanjutnya dapat dilakukan oleh pimpinan program studi dan guru-guru khususnya kelompok mata pelajaran bidang keahlian produktif di SMK KK TKBB.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang berkembang dan studi awal di lapangan berkenaan dengan pelaksanaan implementasi kurikulum pada beberapa SMK KK TKBB, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkembang sebagai berikut:

1. Pemahaman dan kemampuan guru SMK KK TKBB dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum berdasar pada standar-standar nasional pendidikan masih rendah.
2. Pilihan program studi KK TKBB di SMK kebanyakan bukan prioritas siswa dan merupakan pilihan alternatif bilamana siswa tidak diterima di program studi keahlian lainnya, sehingga berdampak pada penurunan motivasi belajar siswa.
3. Masih minimnya penganggaran pembelajaran di SMK KK TKBB, khususnya anggaran untuk pembelian peralatan manual, perawatan mesin-mesin dan pengadaan material praktik. Kondisi ini berakibat menurunnya kualitas proses

pembelajaran yang berdampak pada ketidaktercapaian standar kompetensi keahlian produktif siswa.

4. Masih adanya pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru yang tidak dirancang dan dilaksanakan secara optimal dengan berbagai variasi metode dan penggunaan berbagai media/alat peraga penunjang pembelajaran di kelas, workshop, studio maupun di laboratorium komputer.
5. Penggunaan materi ajar berupa buku teks, modul-modul pembelajaran dan lembar kerja bidang keahlian belum secara optimal dilaksanakan mengingat keterbatasan sarana penunjang di SMK KK TKBB
6. Kualitas lulusan SMK KK TKBB belum seluruhnya mencapai standar kompetensi keahlian yang diharapkan
7. Rendahnya daya serap industri, baik industri jasa konstruksi maupun produksi untuk menerima lulusan SMK KK TKBB, dimana hal ini tidak sejalan dengan kebutuhan akan SDM pada bidang keahlian ini yang sebenarnya masih besar melihat industri properti ini masih prospektif.

Permasalahan yang dipaparkan di atas, setidaknya sudah disadari dan dipahami oleh para penyelenggara pendidikan di SMK KK TKBB maupun para pakar pendidikan teknologi dan kejuruan yang berkaitan dengan program studi keahlian Teknik Bangunan. Tentunya permasalahan tersebut harus dipetakan, dievaluasi, dan dianalisis agar dapat dilakukan penentuan skala prioritas dalam pemecahan masalahnya.

Upaya perbaikan kurikulum dan implementasinya pada dasarnya sudah dilaksanakan, namun secara faktual belum berlandaskan pada hasil kajian evaluasi

Dedy Suryadi, 2013

Pengembangan Model Evaluasi Implementasi Kurikulum Kejuruan (Studi pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terhadap keseluruhan aspek kurikulum yang sudah dilaksanakan. Sehingga perubahan kurikulum dibuat tidak berbasis pada evaluasi terhadap kurikulum lama dan implementasinya di SMK. Pendapat ini diperkuat oleh pandangan yang dikemukakan oleh Soedijarto (2004:90) sebagai berikut:

Dari serangkaian perubahan kurikulum, yang didasarkan atas hasil penilaian nasional pendidikan (*national assesment*) hanyalah kurikulum 1975 dan kurikulum PPSP (1974-1981). Selebihnya merupakan perubahan yang didasarkan asumsi teoritik dan bukan atas dasar temuan-temuan hasil evaluasi yang dilakukan secara sistematis. Karena itu kita sukar untuk menjawab pertanyaan: Seberapa jauh kurikulum 1975, 1984, 1994, 2004 telah, belum atau tidak berhasil mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan.

Pemberlakuan KTSP pada tahun 2006, membuka peluang bagi sekolah untuk dapat melakukan proses perencanaan pengembangan kurikulum, implementasi dan evaluasi kurikulum secara mandiri. Untuk itulah penting dilakukan penelitian dan kajian terhadap komponen-komponen kurikulum yang dilakukan satuan pendidikan berdasarkan kemampuan satuan pendidikan dengan melandaskan pada kondisi faktual, internal dan eksternal kelembagaan.

Berdasarkan analisis terhadap fenomena yang berkembang di SMK KK TKBB dan permasalahan yang diidentifikasi di atas, maka dalam penelitian ini fokusnya adalah kajian proses dalam bentuk pengembangan model evaluasi implementasi kurikulum. Penekanan ini sejalan dengan pendapat Hasting (Hasan, 2008:7) yang berpandangan bahwa evaluasi kurikulum harus mengembangkan fokus pada proses untuk mampu memberikan penjelasan "*the why of outcomes*".

Pada SMK, kurikulum senantiasa harus menyelaraskan dengan perubahan dan kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kualitas lulusan yang disyaratkan industri sebagai *stakeholder* dan *user* lulusan yang meningkat

Dedy Suryadi, 2013

Pengembangan Model Evaluasi Implementasi Kurikulum Kejuruan (Studi pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

setiap waktu. Tentunya mengharuskan dilakukan perbaikan-perbaikan secara berkesinambungan dengan berbasis kajian evaluatif terhadap implementasi kurikulum yang ada. Pada posisi ini, mutlak harus ada model evaluasi implementasi kurikulum yang dikembangkan secara sistemik dan sistematis dengan tetap mengacu pada validitas, reliabilitas, fisibilitas serta kemudahan dalam penggunaannya. Dengan demikian hasil evaluasi menjadi bahan penilaian dan pertimbangan perbaikan implementasi kurikulum di SMK KK TKBB.

Berdasarkan kajian berkenaan dengan model-model evaluasi kurikulum, dan karakteristiknya serta kondisi kelembagaan SMK pada kompetensi keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton, maka peneliti tertarik mengembangkan suatu model evaluasi implementasi kurikulum kejuruan (EIKK). Model evaluasi yang dikembangkan mengadopsi model evaluasi kesenjangan (*discrepancy evaluation model*) yang dikembangkan Provus (Miller and Seller, 1985:310) dengan melakukan modifikasi sesuai tujuan evaluasi. Tujuan model ini sebagaimana disampaikan Alter (1998:64-66) yang menyatakan “*The Discrepancy Evaluation Model (DEM), developed in 1969 by Malcom Provus to provides information for programme assessment and programme improvement*”.

Pilihan model evaluasi ini dianggap sesuai dengan adanya pemberlakuan standar-standar nasional pendidikan secara menyeluruh. Selain itu karena fokus pada implementasi kurikulum, maka model evaluasi ini diarahkan untuk menilai dan membandingkan kinerja implementasi dengan standar yang dirancang berdasar standar proses, sehingga diperoleh informasi berkenaan dengan kesenjangan pada setiap aspek implementasi kurikulum. Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut, maka dilakukan upaya-upaya perbaikan pada setiap

aspek implementasi kurikulum sehingga tujuan kurikulum yang ditetapkan bisa tercapai.

C. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan pemetaan masalah yang berkembang pada komponen implementasi kurikulum di SMK KK TKBB, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Model evaluasi implementasi kurikulum seperti apa yang dapat dikembangkan dan digunakan di SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton?.* Berkenaan dengan model evaluasi yang memfokuskan pada komponen implementasi, maka dimensi evaluasi mencakup pada perencanaan dan pelaksanaan implementasi kurikulum.

Pada aspek evaluasi perencanaan implementasi, meliputi evaluasi terhadap pedoman implementasi kurikulum, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, modul/bahan ajar, pedoman praktik di workshop, pedoman praktik di studio gambar, pedoman praktik di laboratorium komputer, pedoman praktik kerja industri, pedoman tugas akhir, serta pedoman pengujian dan sertifikasi.

Pada aspek evaluasi pelaksanaan implementasi, meliputi evaluasi terhadap dukungan implementasi kurikulum, proses pembelajaran teori, proses pembelajaran praktik di workshop, proses pembelajaran di studio gambar, proses pembelajaran di laboratorium komputer, proses pembelajaran praktik kerja industri, penyusunan tugas akhir, uji kompetensi dan sertifikasi, pembelajaran pengayaan dan remedial, serta pengawasan proses pembelajaran.

Dedy Suryadi, 2013

Pengembangan Model Evaluasi Implementasi Kurikulum Kejuruan (Studi pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Pembatasan Masalah Penelitian

Masalah penelitian ini dibatasi pada pengembangan model evaluasi implementasi kurikulum dengan merujuk pada standar proses yang dikembangkan BSNP meliputi dimensi perencanaan dan pelaksanaan kurikulum. Sedangkan kompetensi keahlian yang dipilih termasuk rumpun program studi keahlian Teknik Bangunan di SMK dan dibatasi pada kompetensi keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton. Untuk mata pelajaran atau standar kompetensi keahlian dibatasi pada kelompok mata pelajaran produktif atau bidang keahlian.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan perumusan dan pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka dalam operasionalnya dijelaskan dalam bentuk pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Model evaluasi implementasi kurikulum kejuruan seperti apa yang dapat digunakan pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton?
2. Bagaimanakah tahapan pelaksanaan model evaluasi implementasi kurikulum kejuruan (EIKK) pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton?
3. Bagaimanakah keunggulan dan kelemahan model evaluasi implementasi kurikulum kejuruan (EIKK) pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton dibandingkan model evaluasi kurikulum lainnya?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian pengembangan model evaluasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan model evaluasi implementasi kurikulum kejuruan (EIKK) pada SMK kompetensi keahlian Teknik Batu Beton.
2. Mendeskripsikan tahapan pelaksanaan model evaluasi implementasi kurikulum kejuruan (EIKK) pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton.
3. Mengetahui keunggulan dan kelemahan model evaluasi implementasi kurikulum kejuruan (EIKK) pada SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu Beton dibanding dengan model evaluasi implementasi lainnya.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Merupakan pengembangan dan penyederhanaan dari model evaluasi kurikulum yang dikembangkan oleh Provus dengan model evaluasi kesenjangan (*discrepancy evaluation model*) yang dimodifikasi. Dengan demikian akan memperkaya dan memperkuat basis-basis keilmuan khususnya pada temuan model evaluasi implementasi kurikulum yang lebih simplistik, valid, reliabel, workability dan kelayakan dalam aplikasi, khususnya dalam aspek efektivitas dan efisiensi pelaksanaan model evaluasi implementasi kurikulum kejuruan.

2. Manfaat Praktis

Salah satu rujukan pengembangan model EIKK adalah kepraktisan dan keluwesan dalam penggunaan model dan instrumen evaluasi implementasi kurikulum. Untuk itu manfaat praktis hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi rujukan bagi guru, pimpinan program studi dan sekolah dalam melakukan tindakan evaluasi implementasi kurikulum di SMK KK TKBB sehingga menjadi acuan perbaikan implementasi kurikulum di sekolah.
- b. Menjadi rujukan bagi penentu kebijakan di lingkungan dinas pendidikan kota/kabupaten dan propinsi khususnya dalam melakukan supervisi bagi perbaikan implementasi kurikulum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah (BSNP).
- c. Menjadi masukan bagi penyelenggara pendidikan lainnya dalam melakukan evaluasi implementasi kurikulum berkenaan dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan.

G. Struktur Penulisan

Bahasan yang dipaparkan dalam penelitian pengembangan model evaluasi implementasi kurikulum ini disajikan dalam lima bagian. Tiap bagian dijelaskan berdasarkan fungsi bahasanya secara sistematis dan antar bagian memiliki keterkaitan sehingga terjaga komprehensivitas dalam pemaparannya. Berikut ini adalah struktur penulisan yang digunakan dan dikembangkan pada penjelasan bab-bab di bawah ini.

Bab I Pendahuluan

Bagian pendahuluan merupakan bagian awal penulisan yang membahas tentang latar belakang, identifikasi, perumusan dan pembatasan masalah, pertanyaan, tujuan, dan manfaat penelitian serta struktur penulisan.

Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Menjelaskan teori-teori yang melandasi konsep model EIKK dan kerangka pemikiran dalam pengembangan konsep dan instrumen model EIKK

Bab III Metode Penelitian

Bahasan bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, subjek penelitian, definisi operasional, pengembangan instrumen penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini menjelaskan tentang temuan penelitian yang meliputi penjelasan secara komprehensif tentang hasil penelitian dan pembahasannya didasarkan pada teori-teori yang digunakan

Bab V Simpulan dan Rekomendasi

Bagian ini merupakan bahasan temuan akhir berupa simpulan yang merupakan jawaban terhadap tercapai tidaknya tujuan penelitian dan rekomendasi yang disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap berkaitan dengan temuan penelitian.